

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	T-3	27-8-2002

22 Penambang segera beroperasi di hutan lindung

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah berharap awal September 22 perusahaan tambang dengan total investasi US\$8 miliar yang berlokasi di hutan lindung dapat segera beroperasi, sehingga dapat memacu pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI).

"Dua komisi di DPR sudah sudah setuju untuk membentuk tim kecil yang akan memberikan keputusan mengenai dua proyek pertambangan yang operasinya tertahan akibat UU No.41 Tahun 1999," kata Menko Perencanaan Dorodjatun Kuntjara-Jakti usai sidang kabinet terbatas yang khusus membicarakan pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan pengembangan industri terpadu (Kapet).

Menurut dia, ada kurang lebih 150 pertambangan yang tertahan sekarang dengan total nilai US\$32 miliar. Sedangkan 22 perusahaan pertambangan yang dibahas dengan DPR itu bernilai US\$8 miliar.

"Apabila yang 22 ini bisa selesai, kami ingin berangkat ke kelompok berikutnya hingga jumlah 50 perusahaan akan terkejar penyelesaiannya," tambah Menko.

Bila persoalan tambang itu rampung, tambahnya, akan menjadi pendorong dan stimulus bagi perkembangan KTI karena di kawasan itu semua kegiatan utamanya terkait dengan sumber daya alam seperti perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Sementara itu, Meneg Percepatan Pembangunan KTI (PPKTI) Manuel Kaisiepo mengatakan konflik akibat tumpang tindih lahan pertambangan dan hutan lindung menjadi salah satu poin yang dibahas dalam sidang kabinet karena termasuk masalah utama yang dihadapi dalam PPKTI.

"Sekarang kita lihat ada titik terang bagi masalah pertambangan di hutan lindung ini, terutama setelah rapat gabungan antara Komisi III dan Komisi VIII DPR," ujar Kaisiepo yang berharap dalam waktu dekat pertambangan tersebut dapat beroperasi.

Sudah ada putusan

Menurut Meneg, awal September sudah ada keputusan untuk mengizinkan ke 22 perusahaan tambang itu beroperasi. Optimismenya itu didasari oleh kenyataan bahwa kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu sudah dibuat sebelum UU No. 41 diterbitkan.

Daerah, lanjutnya, berharap penyelesaian dalam waktu dekat karena pembukaan tambang akan menghasilkan devisa bagi pembangunan daerahnya, membuka lapangan pekerjaan dan memberi efek ganda.

Bahwa ada daerah yang komplain atas pemberian izin itu, Kaisiepo menyatakan memang ada daerah yang merasa dirugikan tapi juga ada yang diuntungkan. Namun dia menolak menyebut daerah mana yang merasa diuntungkan. (rah)